

HITUNG ULANG MANFAAT EKSPOR LISTRIK BERSIH

Bisnis, JAKARTA — Otoritas energi nasional bakal mengkaji ulang skema ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT agar bisa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri di tengah upaya mencapai target *net zero emission* pada 2060.

Affiah R. Nurdifa
affiah.nurdifa@bisnis.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerintah bakal berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul dalam pemanfaatan EBT. Terlebih, Indonesia juga terkenal sebagai salah satu negara dengan cadangan EBT paling banyak dan beragam di dunia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya bakal memastikan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan ekspor listrik berbasis EBT agar bisa mengamankan kebutuhan listrik bersih di dalam negeri, dan sejumlah target yang terkait dengan transisi energi.

"Terkait dengan ekspor listrik, kami sedang mengkaji karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan siapkan dan berikan, tetapi saya akan mementingkan kepentingan nasional," katanya, dalam Green Initiative Conference 2024, Rabu (25/9).

Dirinya mengaku tidak ingin daya saing dan keunggulan komparatif Indonesia dalam pemanfaatan EBT beralih ke negara lain melalui ekspor listrik bersih. Terlebih, kebutuhan listrik bersih di dalam negeri hingga kini masih belum terpenuhi sepenuhnya.

Sebagai catatan, Dewan Energi Nasional merevisi target porsi EBT dalam bauran energi nasional menjadi 17%—19% pada 2025 dari semula 23%. Progres pema-

mendahulukan kepentingan dan kebutuhan nasional.

"Setelah itu [baru] kami lihat nilai ekonominya dan kepentingan negara kita. Kami rumuskan, dan nanti Pemerintah Indonesia yang akan bicara negara mana saja yang akan dituju," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menargetkan 60% pasokan listrik di dalam negeri bakal berasal dari EBT pada 10 tahun mendatang. Target tersebut pun bakal dituangkan ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025—2035.

"Saya mulai sejak diperintahkan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merevisi RUPTL 2025—2035. Sekitar 10 tahun ke depan itu minimum 60% [pasokan listrik] harus berasal dari EBT," ucapnya.

Akan tetapi, masih ada setidaknya tiga tantangan yang perlu diselesaikan agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan listrik bersih di dalam negeri, salah satunya terkait dengan ketersediaan jaringan transmisi kelistrikan yang saling terkoneksi.

"Masalahnya ada tiga, pertama transisi. Jadi, panas bumi, angin, dan air itu ada betul ada sumbernya, tetapi jaringannya belum ada. Kalau PLN atau swasta mau membangun ini [pembangkit listrik berbasis EBT] mau dijual ke mana? Karena *enggak* punya jaringan listrik," ujarnya.

tifikasi lokasi sumber RBT di Tanah Air, sembari pemerintah menyelesaikan kebijakan yang bisa mengintervensi pembangunan jaringan listrik.

Tantangan *kedua* adalah investasi untuk menyambungkan EBT membutuhkan relatif besar, bahkan membutuhkan belanja modal atau *capital expenditure* (capex) hingga triliunan rupiah. *Ketiga*, ekspor listrik bersih dengan tetap mendahulukan pemenuhan kebutuhan nasional.

MULTIPLIER EFFECT

Secara terpisah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membeberkan bahwa kesepakatan dengan Singapura membuka potensi investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pabrik fotovoltaik dengan nilai mencapai US\$30 miliar—US\$50 miliar.

"Ini [ekspor listrik berbasis EBT ke Singapura] akan membuka investasi sekitar US\$30 miliar—US\$50 miliar dalam pembangunan tenaga surya dan manufaktur fotovoltaik," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa waktu lalu.

Adapun, nilai proyek ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US\$20 miliar.



Kami akan siapkan dan berikan, tetapi saya akan mementingkan kepentingan nasional.

Tidak hanya menguntungkan Indonesia, kerja sama itu juga bisa mengamankan pasokan listrik bersih untuk Singapura melalui sistem penyimpanan energi baterai dan listrik dari panel surya atau fotovoltaik yang diproduksi di Indonesia.

Sementara itu, kerja sama itu juga sangat penting bagi Indonesia untuk mengamankan pangsa pasar dan lanskap ekspor energi. Apalagi, Indonesia juga memiliki sumber daya pasir silika sebagai salah satu bahan baku panel surya.

Di sisi lain, Energy Market Authority (EMA) Singapura telah memberikan persetujuan bersyarat kepada tujuh perusahaan untuk mengimpor listrik rendah karbon.

Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya, di mana izin hanya diberikan kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar

Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy.

EMA nantinya akan menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek itu berada dalam tahap pengembangan lanjutan. Lisensi bersyarat juga menandakan bahwa proyek-proyek tersebut telah menunjukkan kemampuan memenuhi persyaratan ketat dari Indonesia dan Singapura.

"Saya juga dengan senang hati mengumumkan bahwa EMA akan memberikan persetujuan bersyarat tambahan kepada dua proyek lagi, masing-masing dari Total Energies & RGE, dan Shell Vena Energy Consortium," kata Menteri Tenaga Kerja Singapura Tan See Leng.

Selain itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Indonesia secara resmi telah melakukan ekspor listrik ke Papua Nugini.

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan bahwa ekspor tenaga listrik ke Papua Nugini dilakukan melalui penyaluran daya yang dengan pembangunan jaringan listrik di perbatasan Skouw, Papua dan Desa Wutung di Papua Nugini.

"Terkait dengan pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw dan Wutung, dapat saya sampaikan bahwa kerja sama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini," katanya saat menerima Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. (Akber Evandio/Lukman Nur Hakim)



Data Negara dengan Jumlah PLTS Beroperasi Terbanyak di Dunia pada Juni 2024

ngunan pembangkit listrik berbasis EBT yang tidak sesuai harapan menyebabkan ada selisih 7,4 gigawatt (GW) listrik bersih yang harus dikejar untuk mencapai porsi 23%.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap ekspor listrik bersih, selama dilakukan dengan skema dan pertimbangan yang baik, serta

Kenyataan tersebut membuat pemerintah memerintahkan PLN untuk mengiden-



PLTA masih jadi andalan dalam pembangkit listrik berbasis EBT.

Pengembangan PLTS masih terkendala regulasi dan teknologi.

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Surya (MW)



Negara dengan PLTS Terbanyak

China	10.549 unit
Jerman	5.641 unit
Amerika Serikat	5.560 unit
Spanyol	1.869 unit
Prancis	1.750 unit
India	1.259 unit
Inggris	1.251 unit
Italia	1.131 unit
Ukraina	522 unit
Jepang	520 unit

Kebutuhan Investasi untuk Transisi Energi Indonesia Hingga 2030 (Miliar US\$)

Sumber: Kementerian ESDM, Kemendiknas, dan data Indonesia. BISNIS/SINTA NOVIZAH

